



IKD BERIKAN KEMUDAHAN BAGI MASYARAKAT

Undang Warga Dongkrak Capaian Aktivasi

YOGYA (KR) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Yogya melakukan akselerasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi warga. Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah dengan mengundang wajib KTP Kota Yogya yang belum melakukan aktivasi IKD. Selain menggenjot capaian aktivasi IKD, strategi ini juga efektif sebagai sarana sosialisasi akan pentingnya IKD kepada masyarakat.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota Yogya Dyah Intan Usaratri, menjelaskan Kemantren Umbulharjo menjadi sasaran awal karena memiliki jumlah penduduk terbesar sekaligus capaian IKD terendah saat itu. Hasilnya, capaian IKD Umbulharjo meningkat signifikan yang dulunya di bawah 10 persen kini meningkat menjadi 31,47 persen.

Metode serupa juga diterapkan di Kemantren Gedongtengen sebagai kemantren dengan capaian terendah kedua. "Secara keseluruhan Kota Yogya capaian IKD yang semula sekitar sembilan persen pada Oktober 2025, kini sudah

mencapai 14,15 persen," jelasnya, Minggu (4/1).

Intan mengungkapkan, metode jemput bola aktivasi IKD yang dilakukan di kelurahan dan kemantren sebelumnya dinilai kurang efektif dengan tingkat kehadiran warga relatif rendah. Oleh karena itu, Dukcapil menerapkan pendekatan undangan by name by address sejak November 2025.

Undang-an aktivasi IKD untuk kemantren lainnya akan disebarluaskan secara bertahap pada tahun 2026 ini. Pada bulan ini Dukcapil memfokuskan undang-an aktivasi IKD bagi penduduk Kemantren Gondokusuman yang didistribusikan melalui kelurahan dan RT,

baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui grup WhatsApp warga.

Meski demikian, Intan menegaskan layanan IKD tetap terbuka bagi seluruh warga Kota Yogya pada hari dan jam kerja di kantor Dinas Dukcapil dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya meskipun undangan bulan Januari diprioritaskan untuk Gondokusuman guna mengatur antrian.

Menurutnya, percepatan aktivasi IKD sangat penting agar semakin banyak penduduk yang merasakan manfaat IKD. IKD digunakan sebagai Digital Wallet yang menyimpan berbagai dokumen administrasi kependudukan (adminduk) seperti KK, KTP, KIA, Akta Kelahiran dan biodata WNI.

Selain itu IKD memudahkan pengajuan layanan adminduk tanpa harus datang ke Kantor Dukcapil karena cukup secara online melalui IKD. Layanan adminduk yang bisa dilakukan melalui IKD yaitu pengajuan Kartu Keluarga, biodata WNI, surat keterangan pindah bagi individu, pisah KK bagi individu, penduduk nonpermanen, perubahan golongan

darah, perubahan pendidikan, pengajuan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Melalui IKD, persyaratan dokumen menjadi lebih sederhana karena sebagian besar data sudah terekam secara digital. "Keuntungan IKD itu syaratnya lebih sedikit, prosesnya lebih praktis, dan dokumen bisa dicetak mandiri melalui IKD di mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang tersedia di 10 lokasi, atau dibantu oleh kemantren dan kelurahan," tambah Intan.

Mesin ADM di Kota Yogya bisa ditemukan di Kantor Dindukcapil, Kantor Mal Pelayanan Publik, UPT PASTY, Taman Pintar, Kantor Kemantren Jetis, Kantor Kemantren Mergangsan, Kantor Kemantren Wirobrajan, Kantor Kemantren Danurejan, Kantor Kemantren Ngampilan, Kantor Kelurahan Rejo-winangun.

Dalam aktivasi IKD, Dinas Dukcapil mengimbau agar masyarakat waspada terhadap penipuan berkedok aktivasi IKD, yaitu dengan menginstal aplikasi IKD yang resmi hanya dari Play Store atau App Store. Kegiatan aktivasi IKD

harus dilakukan secara langsung dengan petugas Dukcapil, tidak dapat diwakilkan, dan tidak dipungut biaya.

Ke depannya banyak layanan publik berbasis aplikasi yang mewajibkan login menggunakan IKD. Beberapa di antaranya adalah layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui aplikasi Sentuh Tanahku, aplikasi Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan serta aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari Kementerian Sosial untuk pengajuan dan pencairan bantuan sosial secara mandiri.

Selain itu IKD juga akan semakin diterima di berbagai layanan publik seperti perbankan, stasiun, dan bandara. Pihaknya berharap masyarakat semakin menyadari manfaat IKD sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis satu data kependudukan. "IKD bukan menggantikan KTP fisik, tapi memudahkan. Ini proses transisi. Pelan-pelan masyarakat akan terbiasa, sebagaimana sekarang hampir semua orang sudah terbiasa membawa ponsel," pungkaskan Intan. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005